



# **INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2009**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 untuk diketahui oleh masyarakat dengan harapan masyarakat dapat memberikan tanggapan sebagai bahan masukan/perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan.

## **A. GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA**

Kota Surabaya berada di 7° 9'–7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 57' Bujur Timur, sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter diatas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah selatan merupakan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter diatas permukaan laut.



Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga Desember 2009 adalah sejumlah 2.938.225 jiwa. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari sejumlah 226.814 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Bulak sejumlah 36.615 jiwa.

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada Tahun 2009 berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 1.474.874 jiwa penduduk laki-laki (50,20%) dan 1.463.351 (49,80%) jiwa penduduk perempuan

Struktur ekonomi Surabaya masih ditopang oleh sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 61.85% pada tahun 2009. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor utama yang menopang perekonomian dengan kontribusi sebesar 38.26% dan merupakan sektor yang menyumbang PDRB paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Hal ini mencerminkan bahwa Surabaya merupakan kota yang kondusif dalam iklim usaha dan perdagangan serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

Kota Surabaya dengan penduduk kurang lebih sebanyak 2,9 juta jiwa merupakan pasar dan potensi ekonomi yang potensial. Selain didukung oleh sektor tersier yang sangat besar peranannya, Surabaya juga didukung oleh sektor sekunder dengan kontribusi total mencapai 38.06% pada tahun 2009. Sektor tersebut terdiri atas sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar



28.10%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3.26% dan sektor konstruksi sebesar 6.70%. Perkembangan yang terjadi dalam sektor-sektor penggerak perekonomian kota tidak terlepas dari adanya dukungan masyarakat yang kondusif serta dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya.

Potensi unggulan yang dimiliki Kota Surabaya merupakan produk yang berasal dari UMKM. Usaha ini bukan hanya berfungsi dalam penyerapan tenaga kerja, namun terbukti sebagai suatu bentuk kegiatan usaha yang memiliki fleksibilitas dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sebagai katup pengaman kebutuhan rumah tangga. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan usaha untuk mengembangkan UMKM seperti pelatihan dan pendampingan. Beberapa produk unggulan yang ada antara lain makanan dan minuman, pakaian jadi, kerajinan tangan, furniture dan olahan hasil laut.

Kondisi ekonomi daerah secara umum ditunjukkan antara lain oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan investasi. PDRB Kota Surabaya ditinjau dari segi produksi, yaitu berasal dari total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit Produksi di Kota Surabaya dalam periode tertentu.

PDRB Kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar Rp 154.242.135,97 juta (Atas Dasar Harga Berlaku) yang disumbang oleh sembilan sektor ekonomi yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR); sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Dari kesembilan sektor tersebut sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan



sektor yang menyumbang PDRB paling besar yaitu sebesar Rp 60.349.244,27 juta (Tahun 2009). Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor PHR yaitu mencapai Rp 44.382.834,12 juta (ADHB) Pendapatan perkapita Kota Surabaya pada tahun 2009 lebih kurang besarnya Rp. 53.186.943.

Trend pertumbuhan ekonomi di Surabaya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Trend penurunan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur maupun nasional. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2009 sebesar 5.51% masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar (4.77%) dan Nasional (4%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Kota Surabaya membaik di tengah isu gejolak ekonomi global, selain itu dampak positif sebagai kota perdagangan terbesar kedua setelah DKI Jakarta adalah daya beli masyarakat di sini cukup tertolong, dengan adanya persaingan antar usaha, sehingga masyarakatnya dapat mengkonsumsi barang atau jasa yang lebih murah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Peranan sektoral pada tahun 2009 tertinggi ada pada Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Industri Pengolahan. Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berkontribusi sebesar 38.26%, sedangkan peranan Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar 28.10%. Peranan sektor lainnya tidak berpengaruh sebesar kedua sektor tersebut, pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi pada tahun 2009 sebesar 10.10% . Sektor yang peranannya sangat kecil adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan (0,01%), sedangkan Sektor Pertanian (0,09%).



## B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2009 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 –2010, dengan visi **SURABAYA CERDAS DAN PEDULI** atau *Surabaya Smart and Care*.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 8 misi pembangunan yang harus ditempuh, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah *Greater Surabaya* dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem IT yang memadai.
3. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi pengembangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, investasi serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan social masyarakat.
5. Mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berwawasan global dan terjangkau bagi warga kota serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman.



7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat.
8. Menggali dan meningkatkan khasanah budaya lokal serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis dan bertoleransi

Strategi dan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009 yaitu:

### **1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam lingkup pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah,
- b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah
- c. Mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah

### **1.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan;
- b. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta



- pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- c. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
  - d. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat
  - e. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, Belanja Daerah pada tahun 2009 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 60,70%, yang meliputi belanja tidak langsung meningkat sebesar 40,25% dan belanja langsung meningkat sebesar 41,49%.
  - f. Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
  - g. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:
    1. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Surabaya 2006-2010 dan berdampak luas terhadap



kepentingan masyarakat.

2. Mengefektifkan mekanisme musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.
  3. Menekan belanja perjalanan dinas keluar Kota Surabaya kecuali hanya untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan mendesak serta berdampak luas bagi kepentingan pembangunan dan masyarakat Kota Surabaya.
  4. Mengefektifkan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan untuk menjamin program dan kegiatan yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya.
- h. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah melalui:
1. Pengembangan dan pematapan sistem informasi keuangan daerah melalui dari perencanaan anggaran, penatausahaan hingga pelaporan sebagai bahan pengambilan kebijakan.
  2. Peningkatan kualitas aparat pengelola keuangan daerah.
  3. Penciptaan pola pengawasan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.
  4. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan transparan serta akuntabel
- i. Kebijakan alokasi anggaran belanja akan diselaraskan dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan yang ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)





tahun 2009 sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2004, dan pencapaian tujuan pembangunan millenium (*Millenium Development Goals*) yang diikrarkan oleh seluruh negara anggota PBB pada September 2005. Kebijakan alokasi belanja tahun 2009 diprioritaskan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2006-2010 **Kota Surabaya Cerdas dan Peduli** (*Surabaya Smart and Care*).

### 1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan diperoleh dari SILPA yang dialokasikan untuk membiayai defisit anggaran.
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan serta pembayaran pokok utang.

## C. URUSAN DESENTRALISASI

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2009, berikut uraian pencapaian pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Surabaya Tahun 2006-2010.



## **1. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN**

Urusan Wajib Pendidikan dan Perpustakaan diimplementasikan melalui Program Penyelenggaraan Pendidikan. Program penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik formal mulai pra sekolah SD, SMP, SMU/SMK maupun non formal. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan meningkatnya pemerataan pada semua jenjang, dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

Pencapaian sasaran untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

#### **1. Angka Kelulusan**

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

##### **a. Angka Kelulusan SD/MI**

Pada tahun 2009, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 41.278 siswa, sedangkan yang dinyatakan lulus sebanyak 41.278 siswa atau 100.00%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100.52%. dari target yang telah ditetapkan sebesar 99.48%



b. Angka Kelulusan SMP/MTs

Pada tahun 2009, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 34.199 siswa, sedangkan yang dinyatakan lulus sebanyak 33.789 siswa atau 98.80%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 98.91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99.89%.

c. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

Pada tahun 2009, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 31.655 siswa, sedangkan yang dinyatakan lulus sebanyak 31.158 siswa atau 98.43%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 99.62% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98.81%.

## 2. Kompetensi Guru

Kompetensi guru dihitung berdasarkan jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi akademik dibandingkan jumlah seluruh guru pada setiap jenjang pendidikan.

a. Kompetensi Guru SD/MI

Pada tahun 2009, jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 14.208 guru, sedangkan yang memenuhi standar kompetensi akademik sebanyak 9.428 guru atau 66.36%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 84.79% dari target yang telah ditetapkan sebesar 78.26%.

2. Kompetensi Guru SMP/MTs

Pada tahun 2009, jumlah guru pada jenjang pendidikan



SMP/MTs sebanyak 8.161 guru, sedangkan yang memenuhi standar kompetensi akademik sebanyak 6.597 guru atau 80.84%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 87.75% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92.13%.

c. Kompetensi Guru SMA/SMK/MA

Pada tahun 2009, jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 8.425 guru, sedangkan yang memenuhi standar kompetensi akademik sebanyak 7.389 guru atau 87.70%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 123.85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70.81%.

### **3. Siswa Kejuruan Yang Diterima Bekerja**

Salah satu tujuan didirikannya Sekolah Kejuruan adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan lulusan sekolah dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja terampil.

Pada tahun 2009, jumlah siswa kejuruan yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 12.421 siswa, sedangkan yang diterima bekerja sebanyak 7.701 siswa atau 62.00% yang sebagian besar bergerak di bidang usaha industri. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 68%, maka capaian kinerjanya mencapai 91.18%.

b. **Peningkatan Pemerataan Pada Semua Jenjang Pendidikan**

Pencapaian sasaran untuk meningkatkan pemerataan pada semua jenjang pendidikan, diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

**1. Angka Melek Huruf**



Angka melek huruf dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas.

Pada tahun 2009, jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun keatas tercatat sebanyak 2.300.379 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan usia tersebut yang bisa membaca dan menulis sebanyak 2.236.379 jiwa atau 97.22 %

## **2. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

### **a. Angka Partisipasi Murni SD/MI**

Pada tahun 2009, jumlah penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun sebanyak 248.583 jiwa, sedangkan yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 231.008 siswa atau 92.93%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101.32% dari target yang telah ditetapkan sebesar 91.72%.

### **b. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs**

Pada tahun 2009, jumlah penduduk usia 13 sampai dengan 15 tahun sebanyak 98.552 jiwa, sedangkan yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 79.009 siswa atau 80.17%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100.45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 79.81%.



c. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA

Pada tahun 2009, jumlah penduduk usia 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 82.280 jiwa, sedangkan yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 68.942 siswa atau 83.79%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 104.18%. dari target yang telah ditetapkan sebesar 80.43%.

Dengan demikian, persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Surabaya mencapai 85.63%. APM belum dapat memberi gambaran tentang anak yang tidak bersekolah karena realita di Surabaya banyak anak usia tersebut tidak masuk dalam rentang waktu atau usia normal jenjang sekolah tersebut.

**3. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar dihitung berdasarkan jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

a. Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Pada tahun 2009, jumlah penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun sebanyak 248.583 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 261.509 siswa atau 105.20%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100.00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 105.20%.

b. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

Pada tahun 2009, jumlah penduduk usia 13 sampai dengan 15 tahun sebanyak 98.552 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa



pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 98.355 siswa atau 99.80%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100.00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99.80%.

c. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA

Pada tahun 2009, jumlah penduduk usia 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 82.280 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 88.953 siswa atau 108.11%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100.00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 108.11%.

Dengan demikian, persentase Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Surabaya mencapai 104.37%. Hal ini disebabkan karena adanya siswa dari wilayah Kabupaten/Kota lain yang bersekolah di Surabaya.

**4. Jumlah SD/MI dan SMP/MTs Negeri Yang Membebaskan SPP dan Uang Pangkal**

Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan dana untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOPDA) sebagai pendamping dana BOS untuk 217.121 siswa sekolah negeri dengan rincian sebagai berikut Sekolah Dasar sebanyak 176.528 Siswa yang tersebar di 496 sekolah dasar negeri dan 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 40.953 siswa yang tersebar di 45 sekolah dan 4 Madrasah Tsanawiyah.

Disamping memberikan BOPDA pada sekolah negeri, Pemerintah Kota juga mengalokasikan BOPDA kepada 916 sekolah swasta dengan rincian, SD/MI sebanyak 442 sekolah dan SMP/MTs



sebanyak 272 sekolah, 118 SMA/MA dan 84 SMK.

Dana BOPDA tersebut diberikan kepada 256.909 siswa SD/MI Negeri maupun Swasta, 107.709 siswa SMP/MTs Negeri maupun swasta, 19.070 siswa SMA/MA negeri maupun swasta yang tidak mampu dan 48.482 siswa SMK Negeri maupun swasta.

Terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2009, besaran bantuan dana (BOS dan BOPDA) yang diberikan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar Rp 62.300,00 SMP/MTs sebesar Rp 118.500,00, SMA/MA sebesar Rp 152.000,00, SMK Negeri sebesar Rp 152.000,00 dan SMK Swasta sebesar Rp 152.000,00. Disamping menyediakan dana BOPDA, Pemerintah Kota Surabaya juga mengalokasikan anggaran untuk anak usia sekolah yang belum atau tidak sekolah.

Dengan demikian, jumlah SD/MI dan SMP/MTs Negeri yang telah membebaskan SPP dan uang pangkal sebanyak 536 sekolah, sehingga capaian kerjanya mencapai 87.43% dari target yang telah ditetapkan sebesar 536 sekolah. Sesuai target dari RPJMD, awalnya terdapat 613 sekolah, namun karena proses merger pada tahun 2009 hanya terdapat 536 sekolah yang terdiri dari 491 Sekolah Dasar dan 45 SMP Negeri. Namun demikian, 536 sekolah tersebut telah membebaskan SPP dan uang pangkal seluruhnya.

Pada tahun 2009, Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya mengikuti Lomba Penilaian Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan mendapatkan penghargaan





berupa piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Timur No. 002.6/989/210.4/2009 tentang Perpustakaan Percontohan Tahun 2009 Bidang Pembinaan dan Kerjasama Perpustakaan.

## **2. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

Urusan Wajib Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di implementasikan melalui Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana. Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan serta memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan dengan upaya promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

### **1. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup**

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 9.16 per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menunjukkan bahwa, dari 52.697 kelahiran hidup terdapat 483 kematian bayi yang antara lain disebabkan karena Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 34.44 %, Lain-lain (gangguan fungsi multi organ, Bronkopneomoni, Gizi Buruk), Asfiksia 16.67%, Kelainan Kongenital 8.89%, Tetanus Neonatorum 3.33%, Infeksi 2.22% dan Trauma Lahir 2.22%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu  $\leq 10$  per 1.000



kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 108.4 %.

## **2. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Persalinan Hidup.**

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 81.60 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menunjukkan terjadi 43 Kematian Ibu Melahirkan dari 52.697 Kelahiran Hidup. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan antara lain adalah Emboli Air Ketuban, Infeksi TBC, Odema Paru, Hipertensi Kronik, Gastritis Kronik, Sesak Nafas, Jantung, Krisis Thyroid 66.67%, HPP (Pendarahan Post Partum) 16.67% serta Preeklamsia 16.67%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu  $\leq 125$  per 100.000 Kelahiran Hidup, maka capaian kinerjanya adalah 134.72%.

## **3. Balita Dengan Status Gizi Buruk**

Balita dengan status gizi buruk dihitung berdasarkan berat badan balita dibandingkan dengan tinggi badan balita (BB/TB). Berdasarkan hasil survey pada tahun 2009, terdapat 1.888 anak balita yang memiliki status gizi buruk atau 1.39% dari keseluruhan jumlah anak balita sebanyak 136.155 anak balita. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar  $\leq 1\%$ , maka capaian kinerjanya sebesar 61%.

## **4. Angka Kematian Kasar**

Pada tahun 2009, jumlah penduduk di Kota Surabaya sebanyak 2.938.225 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang meninggal sebanyak 8.858 jiwa, sehingga angka kematian kasar tercatat sebesar 0.30%. Dibandingkan



dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0.38%, maka capaian kinerjanya mencapai 121.05%.

### **3. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM**

Urusan Wajib Pekerjaan Umum diimplementasikan melalui 3 (tiga) program yaitu Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan serta Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemantapan fisik pembangunan jalan dan jembatan serta penambahan kapasitas jalan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan.

Panjang jalan di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2009 adalah 1400 km dengan lebar jalan berkisar antara 3 meter sampai dengan 30 meter, sedangkan kapasitas jalan yang ada, rata-rata mencapai 223,523 satuan mobil penumpang per jam (smp/jam) dengan volume kendaraan rata-rata mencapai 155,099 satuan mobil penumpang per jam (smp/jam).

Berdasarkan data kapasitas jalan dan volume kendaraan tersebut, maka nilai derajat kejenuhan atau V/C ratio mencapai angka 0.692. Angka tersebut diartikan bahwa rata-rata kondisi jalan di Kota Surabaya dalam kondisi stabil dengan kecepatan rata-rata berkisar 30km/jam sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang



Manajemen dan Rekayasa Lalu-lintas di Jalan. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0.8, maka capaian kinerjanya mencapai 113.5%.

Meskipun V/C ratio telah mencapai angka 0.692, namun masih terdapat beberapa jalan strategis di Kota Surabaya yang tingkat derajat kejenuhannya mencapai angka 0.9 sampai > 1,00 dengan kecepatan rata-rata < 15 km/jam. Jalan-jalan strategis tersebut antara lain Jalan A.Yani, Jalan Raya Wonokromo, Jalan Rungkut Menanggal, dan Jalan Urip Sumoharjo

Atas upaya-upaya pengembangan kualitas serta kapasitas jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan tersebut, pada tahun 2009 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan Juara I lomba tertib kinerja pemanfaatan jalan kategori penyelenggaraan jalan dan jembatan tingkat Provinsi.

## **2. Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan.**

Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan utilitas perkotaan seperti listrik, telepon, air dan lain-lain sehingga diperoleh keterpaduan pembangunan. Sasaran dari program ini adalah perluasan jaringan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan indikator sasaran adalah jumlah titik PJU yang dipasang.

Jumlah titik PJU yang terpasang sampai dengan tahun 2009 sebanyak 49.683 titik atau mengalami peningkatan sebanyak 13.129 titik dari tahun 2008, sehingga capaian kinerjanya mencapai 151.86% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 32.717 titik. Tercapainya target program ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pentingnya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan upaya dari Pemerintah Kota untuk memenuhi kebutuhan



masyarakat akan kebutuhan PJU tersebut.

### **3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai**

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya ancaman bahaya banjir serta menanggulangi banjir di perkotaan. Sasaran dari program ini adalah menurunnya ancaman bahaya banjir.

Bahaya banjir setiap tahun selalu menjadi ancaman bagi warga Kota Surabaya. Kondisi tersebut tidak dapat dihindari mengingat pada sebagian wilayah Kota Surabaya berada lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut dengan ketinggian rata-rata antara 3 – 6 m dari permukaan air laut.

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk selalu mengendalikan banjir dengan menekan luas area genangan, lama genangan dan tinggi genangan akibat banjir. Untuk mengukur penurunan ancaman bahaya banjir, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

#### **a. Penurunan Luas Area Genangan**

Penurunan luas area genangan diukur berdasarkan selisih luas area genangan pada tahun 2009 dengan luas area genangan pada tahun 2008. Luas genangan tersebut sangat tergantung pada tingkat curah hujan dan kemampuan kapasitas pompa penyedot banjir yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya.

Luas area genangan di Kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 2,183.07 Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 2,226 Ha, maka capaian kinerjanya mencapai 101,93%. Luas area genangan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 228,4 Ha dari



2,411.47 Ha pada tahun 2008.

#### **b. Penurunan Waktu Genangan**

Waktu genangan air diukur berdasarkan lamanya genangan air untuk surut. Lama genangan air di Kota Surabaya pada tahun 2009 mencapai 59.27 menit (0.98 jam), sehingga capaian kinerjanya mencapai 151% dari target yang telah ditetapkan selama 2 jam. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, lamanya genangan air untuk surut menunjukkan perkembangan yang baik, yaitu dari lama waktu penurunan 1,5 jam menjadi 0.98 jam. Percepatan waktu penurunan genangan air tersebut tidak terlepas dari berfungsinya dengan baik saluran drainase dan pompa air yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya.

#### **c. Penurunan Tinggi Genangan**

Tinggi genangan di Kota Surabaya pada tahun 2009 mengalami penurunan sampai dengan 20.36 cm, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101.80 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 20 cm. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, kinerja penurunan tinggi genangan menunjukkan hasil yang meningkat, yaitu dari 25.58 cm pada tahun 2008 menjadi 20.36 cm pada tahun 2009.

### **4. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PERUMAHAN**

Urusan Wajib Perumahan diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu Program Perumahan dan Permukiman serta Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Program Perumahan dan Permukiman**



Program Perumahan dan Permukiman dimaksudkan untuk penataan perumahan dan permukiman di perkotaan dan untuk mengurangi kekumuhan di kawasan berpenduduk padat. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas permukiman dengan indikator sasaran luas lingkungan perumahan permukiman yang ditangani/dibenahi.

Pada tahun 2009, luas lingkungan perumahan permukiman yang ditangani/dibenahi adalah 323,93 Ha sehingga capaian kinerjanya mencapai 17,05% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.900 Ha. Meskipun capaian indikator tahun 2009 hanya 17,05%, namun secara akumulatif luas lingkungan perumahan permukiman yang sudah ditangani mencapai 8.661,59 Ha. Apabila dibandingkan dengan target indikator secara akumulatif sampai dengan tahun 2009 sebesar 7.000 Ha, maka capaiannya adalah sebesar 124,74%.

Atas upaya-upaya dalam program Perumahan dan Permukiman yang telah dilaksanakan tersebut, pada tahun 2009 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan **Penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) sub bidang penyelenggaraan permukiman kategori Kota Metropolitan dari Departemen Pekerjaan Umum.**

## **2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi adanya bahaya kebakaran. Sasaran dari program ini adalah penanganan kebakaran dengan indikator sasaran waktu tempuh unit pemadam kebakaran tiba di lokasi



kebakaran dan penurunan jumlah kejadian kebakaran. Indikator sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

**a. Waktu Tempuh Unit Pemadam Kebakaran Tiba di Lokasi Kebakaran**

Indikator waktu tempuh unit pemadam kebakaran menggambarkan responsivitas unit pemadam kebakaran dalam menanggapi laporan kejadian kebakaran dari masyarakat. Semakin cepat waktu tempuh unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran menunjukkan semakin baik kinerja penanganan kebakaran dan sebaliknya semakin lama waktu tempuh unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran menunjukkan semakin buruk kinerja penanganan kebakaran. Waktu tempuh tersebut diukur berdasarkan waktu diterima pemberitahuan, waktu perjalanan dan waktu gelar peralatan di lokasi. Pada tahun 2009, rata-rata waktu tempuh unit pemadam kebakaran sampai lokasi kebakaran adalah 13,75 menit, sedangkan target yang ditetapkan adalah 16 menit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 114,06%.

**b. Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran**

Jumlah kejadian kebakaran dari tahun ke tahun diharapkan mengalami penurunan. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2009 jumlah kejadian kebakaran mengalami peningkatan menjadi 301 kejadian yang antara lain disebabkan oleh api terbuka sebanyak 137 kejadian, api mekanik sebanyak 1 kejadian, hubungan arus pendek dan kelebihan beban listrik sebanyak 67 kejadian dan energi akibat persenyawaan bahan kimia sebanyak 0 kejadian.

Kejadian kebakaran di Kota Surabaya tahun 2009, pada umumnya





terjadi di daerah permukiman sebanyak 86 kejadian, bangunan industri sebanyak 23 kejadian, bangunan umum sebanyak 41 kejadian, kendaraan sebanyak 16 kejadian dan 135 kejadian untuk kategori lain-lain.

Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, bahwa jumlah kejadian kebakaran diharapkan mengalami penurunan menjadi 210 kejadian, maka capaian kinerjanya mencapai 56.67%.

## **5. PENYELENGGARAN URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG**

Urusan wajib Penataan Ruang diimplementasikan melalui Program Penataan Ruang. Program Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengatur dan merencanakan pemanfaatan ruang kota, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan program penataan ruang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Sasaran dari program ini adalah tersusunnya rencana tata ruang kota yang aplikatif dan berwawasan lingkungan serta terlaksananya pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

### **1. Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Pada Seluruh Wilayah Kota Surabaya**

Pada tahun 2009, jumlah RDTRK yang tersusun sebanyak 2 Unit Pengembangan (UP) yaitu UP Sambikerep dan UP Wiyung sehingga capaian kinerjanya mencapai 66.67% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 3 UP. Sedangkan jumlah RTRK yang tersusun sebanyak 5 Unit Distrik (UD) yaitu



kawasan SIER, kawasan Ujung, Unit Distrik Beringin-Sememi, Unit Distrik Petemon, dan Unit Distrik Tandes Kidul-Karang Poh, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebanyak 5 UD. RDTRK yang disusun pada tahun 2009 hanya 2 UP, hal ini dikarenakan ada RDTRK untuk 1 UP yang ternyata sudah selesai dikerjakan pada tahun 2008.

Sampai dengan tahun 2009 luas wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah 7,717.35 Ha atau 72.2% dari seluruh luas wilayah Kota Surabaya, sedangkan luas wilayah yang telah memiliki Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) adalah 1.860 Ha atau 94.73% dari luas wilayah Kota Surabaya.

## 2. Jumlah IMB Sesuai Rencana Tata Ruang yang Dikeluarkan

Jumlah bangunan yang memiliki ijin sampai dengan tahun 2009 sebanyak 383,259 unit atau mengalami peningkatan sebanyak 5,185 unit dari tahun 2008 yang meliputi perijinan untuk hunian rumah tinggal sebanyak 3.887 unit dan non rumah tinggal sebanyak 1.298 unit, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100.01% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 383,204 unit. Capaian target indikator sasaran ini didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB, penyebaran informasi dan sosialisasi penyuluhan, pendataan bangunan, adanya pengawasan serta penegakkan hukum.

Atas upaya-upaya yang telah dilaksanakan tersebut, pada tahun 2009 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan **penghargaan ISO 9001: 2008 Quality Manajement System (CERTIFICATE of Compliance)** diberikan oleh **DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen)**.



## **6. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan diimplementasikan melalui Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan indikator sasaran persentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan.

Pada tahun 2009, jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana yang disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 sebanyak 954 kegiatan. Dari seluruh kegiatan tersebut, realisasi pelaksanaan kegiatan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target perencanaan adalah sebanyak 954 kegiatan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100.00%.

## **7. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN**

Urusan Wajib Perhubungan diimplementasikan melalui Program Pengembangan Transportasi. Program Pengembangan Transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sistem transportasi termasuk lalu lintas, pengaturan terminal, parkir dan angkutan umum. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan prasarana pendukung dan manajemen transportasi. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

### **a. Kecepatan rata-rata kendaraan**



Indikator kecepatan rata-rata kendaraan dimaksudkan untuk mengetahui kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di jalan umum Kota Surabaya, yang diukur berdasarkan rata-rata jarak tempuh dibandingkan waktu tempuh.

Pada tahun 2009, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di jalan umum Kota Surabaya mencapai 30 km/jam. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 30 km/jam, maka capaian kinerjanya mencapai 100.00%.

Tercapainya target indikator sasaran ini didukung oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai di Kota Surabaya, antara lain traffic light sebanyak 4 unit, pedestrian crossing traffic light sebanyak 10 unit, warning light sebanyak 5 unit, kamera CCTV sebanyak 10 unit, dan countdown timer display sebanyak 25 unit.

#### **b. Waktu tunggu penumpang**

Indikator waktu tunggu penumpang diukur berdasarkan jumlah angkutan umum per satuan waktu dibandingkan dengan jarak antar-halte dan terminal. Jumlah angkutan umum di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2009 sebanyak 78 jenis trayek, terdiri dari 58 jenis trayek angkutan kota dengan 4.860 unit armada dan 18 jenis trayek bus kota dengan 270 unit armada.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian rata-rata waktu tunggu penumpang digunakan indikator kinerja rata-rata waktu tunggu penumpang bus kota, sehingga dengan tersedianya 18 jenis trayek bus kota dan 270 unit armada, maka waktu tunggu penumpang pada tahun 2009 mencapai 9.45 menit. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 15 menit, maka capaian kinerjanya mencapai 137.00%.



## **8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP**

Urusan Wajib Lingkungan Hidup diimplementasikan melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota serta Program Pengelolaan Kebersihan Kota. Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **a. Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, sehingga menjadi lebih sehat dan lebih nyaman untuk dihuni. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan kota dengan indikator sasaran sebagai berikut:

#### **1. Kualitas Udara yang Layak Hirup**

Kualitas udara yang layak hirup ditunjukkan dengan jumlah hari dengan kualitas udara baik dan sedang. Pada tahun 2009, kualitas udara baik adalah 24 hari dan kualitas udara sedang adalah 311 hari, sehingga kualitas udara yang layak hirup adalah 335 hari atau 91.78% dari 365 hari dalam setahun. Dibandingkan dengan target indikator sasaran yang telah ditetapkan sebesar 350 hari atau 96.00%, maka capaian kinerja terhadap peningkatan kualitas udara yang layak hirup mencapai 95.60%.

#### **2. Kualitas air**

Kualitas air ditunjukkan dengan jumlah sampel air sumur yang memenuhi nilai baku mutu berdasarkan parameter fisika kimia sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 416/MENKES/PER/IX/90 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Pada tahun 2009, jumlah sumur yang dijadikan



sampel untuk menilai kualitas air sebanyak 428 sampel air sumur dari jumlah sumur yang ada di Kota Surabaya sebanyak 116.968 unit. Dari 428 air sumur yang dijadikan sampel tersebut, terdapat 249 sampel air sumur yang memenuhi nilai baku mutu, sehingga jika dibandingkan dengan total sumur yang ada ditambah dengan peningkatan kualitas air yang memenuhi baku mutu 0.5% tiap tahunnya maka nilai baku mutu kualitas air tahun 2009 menghasilkan angka 20.70%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 20.40%, maka capaian kinerjanya adalah 101.47%

### **3. Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketaatan penanggungjawab suatu usaha/kegiatan di sektor industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan membangun Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbahnya sebelum dibuang ke perairan umum dan pemahaman aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Jumlah usaha industri di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2009 sebanyak 427 perusahaan yang terdiri dari 236 perusahaan industri kecil, 183 perusahaan industri menengah dan 8 perusahaan industri besar. Dari 424 perusahaan industri tersebut, yang memiliki IPAL sebanyak 147 perusahaan atau bertambah 2 perusahaan dari 145 perusahaan pada tahun 2008. Penambahan 2 perusahaan yang memiliki IPAL tersebut adalah Grand City dan PT. Perdamaian. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2009 sebesar 145 perusahaan, maka capaian kinerjanya mencapai 101.38%.

#### **b. Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota**



Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keindahan lingkungan kota dan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan kota. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ruang terbuka hijau kota dengan indikator sasaran luasan ruang terbuka hijau yang dikelola Pemerintah Kota.

Ruang terbuka hijau yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan tahun 2009 seluas 381,04 Ha. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan seluas 276.64 Ha, maka capaian kinerjanya mencapai 137.74%. Tercapainya target program ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau serta upaya keras dari Pemerintah Kota untuk menambah proporsi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Surabaya.

### **c. Program Pengelolaan Kebersihan Kota**

Program Pengelolaan Kebersihan Kota dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan indikator sasaran adalah volume tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan volume sampah yang masuk ke TPA. Indikator sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Volume tumpukan sampah di TPS**

Jumlah TPS sampai dengan tahun 2009 sebanyak 186 unit, dengan volume tumpukan sampah rata-rata per hari sebanyak 205.5m<sup>3</sup>. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 259.18 m<sup>3</sup>, maka



capaian kinerjanya mencapai 120.71%.

**b. Volume (berat) sampah yang masuk ke TPA**

Pada tahun 2009, volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 1,229.43 ton per hari, sehingga capaian kinerjanya mencapai 131.05% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,783 ton per hari. Tercapainya target dari indikator sasaran ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah mulai dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas.

**9. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SERTA TRANSMIGRASI**

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil serta Urusan Pilihan Transmigrasi diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke-pendudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk.

Dalam kaitannya dengan urusan kependudukan dan catatan sipil ini, terdapat dua sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kota Surabaya, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Kedua sasaran tersebut meskipun tidak tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kota Surabaya, tetap dipandang perlu untuk dilaporkan mengingat urusan tersebut merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kedua sasaran





tersebut diuraikan sebagai berikut:

## **1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**

### **a. Penduduk ber-KTP**

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP .

Pada tahun 2009, penduduk ber-KTP di Kota Surabaya sebanyak 1,921,368 orang, sedangkan jumlah penduduk yang wajib ber-KTP berjumlah 2,243,893 jiwa, sehingga persentase penduduk ber-KTP sebesar 85,63 %.

### **b. Penduduk ber-KK**

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada.

Pada tahun 2009, jumlah keluarga yang ada sebanyak 813,595 keluarga, sedangkan yang telah memiliki Kartu Keluarga sebanyak 813,595 keluarga atau 100 %.

### **c. Bayi lahir ber-Akte Kelahiran**

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran dari seluruh penduduk yang baru lahir.

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada



tahun 2009 terjadi kelahiran sebanyak 14,137 kelahiran. Dari jumlah tersebut yang memiliki akte kelahiran sebanyak 14,025 kelahiran atau 99.21 %.

**d. Penduduk Meninggal Dunia ber-Akte Kematian**

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang meninggal dunia yang telah memiliki akte kematian, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah akte kematian yang terbit dari jumlah laporan kematian dari kecamatan yang ada.

Pada tahun 2009, jumlah laporan kematian dari kecamatan sebanyak 8.858 orang, sedangkan yang mengurus akte kematian sebanyak 2,792 orang atau hanya 31,52 %. Hal ini menunjukkan kesadaran warga Kota Surabaya dalam mengurus akte kematian masih rendah, karena pada umumnya yang mengurus akte kematian hanya masyarakat tertentu yang memiliki kepentingan/tujuan tertentu misalnya untuk kepentingan pengurusan warisan. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaksanakan sosialisasi mengenai pelayanan kependudukan dari Pencatatan Sipil kepada masyarakat melalui Camat dan Lurah.

**2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan diukur berdasarkan kecepatan waktu pelayanan pengurusan KTP, KK, akte kelahiran dan akte kematian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, yang diuraikan sebagai berikut:



**a. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian pengurusan KTP.**

Indikator ini menggambarkan kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus KTP mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya KTP. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk pengurusan KTP adalah 1 hari.

**b. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian Kartu Keluarga.**

Indikator ini menggambarkan kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Kartu Keluarga, mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya Kartu Keluarga, dengan asumsi bahwa seluruh kelengkapan pendukungnya sudah memenuhi syarat. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk pengurusan KK adalah 5 hari.

**c. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian Akte Kelahiran.**

Indikator ini menggambarkan kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Akte Kelahiran, mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya Akte kelahiran. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk pengurusan Akte Kelahiran adalah 6 hari.

**d. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian Akte Kematian.**

Indikator ini menggambarkan kecepatan yang dibutuhkan untuk mengurus Akte Kematian, mulai dari laporan kematian hingga tercetaknya Akte Kematian. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk mengurus Akte Kelahiran adalah 6 hari.

## **10. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN**



## **PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diimplementasikan melalui Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Program tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sasaran dari program ini adalah menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya peran perempuan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

### **a. Jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.**

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut menggambarkan tingkat kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan trafficking (perdagangan orang).

Pada tahun 2009, jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 202 kasus yang seluruhnya ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 41 kasus, maka capaian kinerjanya mencapai 492.68%.

### **b. Jumlah organisasi perempuan yg dibantu**

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator jumlah organisasi perempuan yang dibantu. Jumlah organisasi perempuan yang ada di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2009 sebanyak 85



lembaga. Sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kapasitas internal organisasi perempuan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan kesetaraan gender.

Pada tahun 2009, jumlah organisasi perempuan yang dibantu sebanyak 85 lembaga. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80 lembaga, maka capaian kinerjanya mencapai 106.25%.

## **11. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa diimplementasikan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan meringankan beban bagi warga miskin dengan sasaran meningkatnya penanganan keluarga miskin kota. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

### **a. Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar**

Indikator tersebut menggambarkan upaya Pemerintah Kota dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin. Pengukuran indikator tersebut dilakukan secara kumulatif yaitu jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan dasar pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005. Pelayanan dasar yang diberikan tersebut meliputi bantuan beras miskin (raskin) dan pelayanan kesehatan. Adapun capaian berdasarkan jenis pelayanan dasar yang



diberikan adalah:

**a. Pelayanan Bantuan Beras Miskin (Raskin)**

Pada tahun 2009, keluarga miskin di Kota Surabaya yang mendapatkan pelayanan bantuan beras sebanyak KK yang didanai melalui APBN dengan total beras sebanyak 21,280,500 Kg. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100.00% dari jumlah keluarga miskin tahun 2005 sebanyak 111,223 KK yang mendapatkan bantuan beras miskin (raskin), maka capaian kinerjanya mencapai 106.00%.

**b. Pelayanan Dasar Kesehatan**

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin didasarkan pada keluarga miskin yang memiliki kartu jaminan kesehatan penduduk miskin. Jumlah keluarga miskin yang memiliki kartu jaminan kesehatan pada tahun 2009 sebanyak sebanyak 458,621 Jiwa atau 132,692 KK.

Setiap warga miskin yang memiliki kartu jaminan kesehatan akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara gratis dari sarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah. Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pemegang kartu jaminan kesehatan adalah pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, persalinan, rawat jalan tingkat lanjutan, pemberian obat, paket pelayanan satu hari (one day care), rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan penunjang diagnostik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik, pemeriksaan elektromedik serta layanan gawat darurat meliputi layanan anak, bedah, kardiovaskuler, kebidanan, mata, paru-paru, penyakit dalam,



THT dan psikiatri.

Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 % dari jumlah keluarga miskin tahun 2005 sebanyak 111,223 KK yang mendapatkan pelayanan dasar kesehatan, maka capaian kinerjanya mencapai 119.30 %.

### **c. Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi**

Indikator tersebut menggambarkan upaya Pemerintah Kota untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan. Pengukuran indikator tersebut dilakukan secara kumulatif yaitu jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005.

Pada tahun 2009, keluarga miskin di Kota Surabaya yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 7,780 KK. Pemberdayaan ekonomi tersebut diberikan melalui pelatihan keterampilan masyarakat miskin perempuan. Dengan demikian, jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2009 mencapai 68,888 KK

Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 56% dari jumlah keluarga miskin tahun 2005 sebanyak 111,223 KK yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi, maka capaian kinerjanya mencapai 110.61%.

## **12. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB SOSIAL**



Urusan Wajib Sosial diimplementasikan melalui Program Penanggulangan Masalah Sosial. Program ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah sosial dengan sasaran meningkatnya pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 29,763 orang atau 25.50% dari total PMKS tahun 2005 sebanyak 116.721 orang. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 13.88%, maka capaian kinerjanya mencapai 183.72%.

### **13. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN**

Urusan Wajib Ketenagakerjaan diimplementasikan melalui Program Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan. Program ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja dengan sasaran meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

#### **a. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)**

Indikator tersebut menggambarkan persentase kesempatan kerja yang diukur berdasarkan perbandingan jumlah penduduk di atas usia 15 tahun yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja usia di atas 15 tahun, yang perhitungannya didasarkan atas angka dasar angkatan kerja usia >15 tahun





per 2005.

Jumlah angkatan kerja di atas usia 15 tahun pada tahun 2005 (sebagai angka dasar) adalah sebanyak 1.279.821 orang. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja yang bekerja sampai dengan tahun 2008 sebanyak 1.193.828 orang.

Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Tenaga Kerja berhasil melakukan penempatan kerja sebanyak 9.029 orang tenaga kerja. Dengan penambahan penempatan kerja sebanyak 9.029 tenaga kerja tersebut, sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah angkatan kerja > 15 tahun yang bekerja menjadi 1.202.857 orang. Dengan jumlah penduduk bekerja tersebut, maka tingkat kesempatan kerja tahun 2009 adalah 93,99%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 93,57%, maka capaian kinerjanya mencapai 100,45%.

#### **b. Tingkat Pengangguran Terbuka.**

Indikator tersebut menggambarkan persentase pengangguran terbuka yang diukur berdasarkan perbandingan jumlah penduduk di atas 15 tahun yang mencari kerja dengan jumlah angkatan kerja diatas 15 tahun, yang perhitungannya didasarkan atas angka dasar angkatan kerja usia >15 tahun per 2005.

Jumlah angkatan kerja di atas usia 15 tahun pada tahun 2005 (sebagai angka dasar) adalah sebanyak 1.279.821 orang. Dari jumlah tersebut, yang merupakan penganggur terbuka pada tahun 2009 sebanyak 76.964 orang atau 6,01%. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6,43%, maka capaian kinerjanya mencapai



106,53%.

**c. Persentase Terbentuknya Kader K 3**

Pembentukan Kader K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dimaksudkan sebagai pelopor untuk menurunkan angka kecelakaan kerja. Jumlah kader K3 yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2009 sebanyak 1000 kader atau bertambah sebanyak 36 kader dari 964 kader pada tahun 2008. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 954 kader, maka capaian kerjanya mencapai 104.82%.

**14. PENYELENGGARAAN URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PENANAMAN MODAL DAN PERDAGANGAN**

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian diimplementasikan dalam 2 (dua) program yaitu program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan investasi serta program penataan dan atau pemberdayaan PKL. Program tersebut diuraikan sebagai berikut

**1. Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Investasi**

Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Investasi dimaksudkan untuk meningkatkan investasi, kemandirian UMKM dan Koperasi. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu:

**a. Penambahan Jumlah PMA dan PMDN**



Jumlah PMA dan PMDN di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2009 tercatat sebanyak 364 PMA dan 374 PMDN. Dalam hal ini terdapat penambahan investasi sebanyak 41 PMA dengan nilai US\$ 262.471.899 dan 7 PMDN dengan nilai investasi US\$ 121.913.000 dan Rp.20.950.000.000 dari 323 PMA dan 367 PMDN pada tahun 2008, sehingga total penambahan PMA dan PMDN pada tahun 2009 sebanyak 48 perusahaan atau meningkat sebesar 6.96%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian kinerjanya persentase penambahan jumlah mencapai 139.20%.

#### **b. Jumlah Usaha Mikro Binaan**

Jumlah usaha mikro binaan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 8,619 unit atau mengalami peningkatan sebanyak 2,528 unit dari 6,091 unit pada tahun 2008. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5,965 unit, maka capaian kinerjanya mencapai 144.49%.

#### **c. Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Tangguh**

UKM tangguh didefinisikan sebagai usaha kecil menengah dengan kriteria memiliki modal antara 25 – 200 juta, tenaga kerja sebanyak 3-5 orang, memiliki legalitas usaha berupa SIUP, TDI dan TDP serta mempunyai jangkauan pemasaran di tingkat lokal.

Pada tahun 2009, jumlah UKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 7,277 UKM yang terdiri dari 6.861 UKM perdagangan dan 416 UKM industri. Dari jumlah UKM tersebut, terbentuk 6,559 UKM tangguh. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 3,210 UKM tangguh, maka capaian kinerjanya mencapai 204.33%.



#### **d. Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Mandiri**

UKM mandiri didefinisikan sebagai usaha kecil menengah dengan kriteria memiliki modal lebih dari 200 juta, tenaga kerja lebih dari 5 orang, memiliki legalitas usaha berupa SIUP, TDI, TDP dan sertifikat merk/SP serta mempunyai jangkauan pemasaran sampai di tingkat regional/internasional.

Dari jumlah UKM yang ada pada tahun 2009 sebanyak 7,277 UKM, terbentuk 1,124 UKM mandiri. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1,218 UKM mandiri, maka capaian kinerjanya mencapai 92.28%

#### **e. Jumlah Koperasi Skor Baik**

Indikator tersebut menggambarkan jumlah koperasi yang mempunyai skor baik, yang berarti kelembagaan maupun usahanya mampu untuk mandiri sehingga diharapkan dapat berdampingan bahkan bersaing dengan badan usaha yang lain.

Jumlah koperasi dengan klasifikasi skor baik sampai dengan tahun 2009 mencapai 1,089 unit atau bertambah 269 unit dari 820 unit pada tahun 2008. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 975 unit, maka capaian kinerjanya mencapai 111.69%.

#### **f. Persentase Peningkatan Kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar/lembaga perbankan/lembaga keuangan.**

Pada tahun 2009, kemitraan yang terjalin antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan pengusaha besar/lembaga perbankan sebanyak 1 kemitraan, yaitu kemitraan antara Anak Jaya Sejahtera dengan



PT. Borneo Rotating Pratama. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu terjalannya 2 kemitraan, maka capaian kinerjanya mencapai 50%. Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota hingga terjalannya kemitraan tersebut, antara lain Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi 50 Usaha Kecil Menengah.

## **2. Program Penataan dan Pemberdayaan PKL**

Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai dengan saat ini diakui merupakan sektor penyangga yang mampu menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak dapat terserap di sektor formal. Intervensi Pemerintah untuk pemberdayaan PKL tercermin dari pelaksanaan program penataan dan atau pemberdayaan PKL.

Program Penataan dan atau Pemberdayaan PKL dimaksudkan untuk meningkatkan PKL yang dibina. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase PKL binaan.

Jumlah PKL yang telah dibina pada tahun 2009 sebanyak 3,496 PKL, sehingga sampai dengan tahun 2009 jumlah PKL binaan bertambah menjadi sebanyak 16,058 PKL dari 12,562 PKL pada tahun 2008. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 3,500 PKL, maka capaian kinerjanya mencapai 99.90%.

## **15. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Urusan Wajib Kebudayaan dan Pariwisata diimplementasikan melalui Program Peningkatan Kepariwisata dan Kebudayaan. Program ini



dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya lokal dan kunjungan wisata, dengan sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal serta kunjungan wisata. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

### **1. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi**

Indikator tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga kelestarian warisan bangunan-bangunan bersejarah. Semakin banyak cagar budaya yang dilindungi, menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga kelestarian warisan budaya dan bangunan bersejarah.

Pada tahun 2009, sebanyak 151 bangunan dan 10 situs budaya dilindungi Pemerintah Kota Surabaya. Bangunan dan situs cagar budaya yang dilindungi tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/251/402.1.04/1996 tanggal 26 September 1996 dan Nomor: 188.45/004/402.1.04/1998 tanggal 13 Januari 1998. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 151 bangunan dan 10 situs, maka capaian kinerjanya mencapai 100.00%.

### **2. Jumlah Padepokan Seni dan Budaya Yang Dibina**

Indikator tersebut menunjukkan komitmen dan apresiasi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Bentuk apresiasi Pemerintah Kota Surabaya tersebut antara lain melalui pembinaan kepada lembaga seni dalam bentuk finansial dan non finansial.

Pada tahun 2009 jumlah padepokan seni dan budaya yang dibina



sebanyak 147 lembaga seni, sehingga capaian kerjanya mencapai 245.00% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 60 lembaga seni.

### **3. Pengembangan Seni dan Budaya Lokal**

Indikator tersebut menggambarkan intensitas penyelenggaraan seni dan budaya lokal yang diukur dari persentase peningkatan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya lokal yang diselenggarakan pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelenggarakan dan mengikuti 359 even seni budaya, yang terdiri dari 277 even penyelenggaraan seni dan budaya lokal dan 82 even penyelenggaraan musik/band.

Dengan demikian, persentase peningkatan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya lokal sebesar 15.43%, sehingga capaian kerjanya mencapai 102.87% bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 15.00%.

### **4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara**

Pada tahun 2009, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Surabaya sebanyak wisman; wisnu 7,385,068 orang, yang terdiri dari 7.230.202 wisatawan nusantara dan 154.866 wisatawan mancanegara. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 2,288,755 wisatawan nusantara dan 157,013 wisatawan mancanegara, maka capaian kerjanya mencapai 98.63% untuk kunjungan wisatawan mancanegara dan 315.90% untuk kunjungan wisatawan nusantara.



## **16. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemuda dan meningkatkan prestasi dibidang olah raga, dengan sasaran meningkatnya peran generasi muda dan meningkatnya prestasi olahraga. Sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **1. Meningkatnya Peran Generasi Muda**

Pencapaian sasaran meningkatnya peran generasi muda diukur dengan menggunakan indikator persentase organisasi/pemuda yang berprestasi. Indikator ini dimaksudkan untuk menilai potensi, kepedulian dan peran organisasi maupun pemuda.

Pada tahun 2009, organisasi/pemuda yang dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 18 organisasi/pemuda. Dari jumlah tersebut, 4 pemuda atau 22.30% diantaranya mendapatkan prestasi. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5.00%, maka capaian kinerjanya mencapai 446.00%.

### **2. Meningkatnya Prestasi Olahraga**

Pencapaian sasaran meningkatnya prestasi olahraga diukur dengan menggunakan indikator persentase organisasi/personil olahraga yang berprestasi.

Pada tahun 2009, terdapat 43 cabang olah raga yang dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dari 43 cabang olahraga tersebut, sebanyak 38 cabang olah raga mampu mencetak prestasi internasional maupun nasional. Dibandingkan tahun 2008, dimana ada 28 Cabang Olahraga yang





berprestasi, maka terjadi peningkatan 10 cabang olahraga atau 23,3% yang berprestasi. Dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian kinerjanya mencapai 446%. Tercapainya target indikator sasaran ini didukung oleh adanya penambahan jumlah cabang olahraga yang berprestasi antara lain ski air, loncat indah, selam, tenis, panahan, taekwondo, karate, catur, volley, panjat tebing dan tinju.

## **17. PENYELENGGARAAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diimplementasikan melalui 2 (dua) program, yaitu Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Program Fasilitas Pemantapan Multikultur. Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **a. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman**

#### **Masyarakat**

Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah serta dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator persentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.

Pada tahun 2009, jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Surabaya sebanyak 61,714 obyek dari 11 operasi penertiban. Sedangkan yang berhasil ditindaklanjuti sebanyak 54,845 penindakan atau 88.86%. Bila



dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 96.50%, maka capaian kinerjanya mencapai 92.08%.

**b. Program fasilitas pemantapan multikultur.**

Program Fasilitas Pemantapan Multikultur dimaksudkan untuk menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka memperkuat kerukunan warga kota. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan forum antar kelompok masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang melibatkan masyarakat.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan forum antar kelompok masyarakat digunakan indikator jumlah konflik masyarakat yang difasilitasi dan jumlah penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat yang dilakukan. Indikator-indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur sampai sejauh mana Pemerintah Kota menyediakan wadah untuk memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sehingga kejadian yang berpotensi konflik baik horisontal maupun vertikal di masyarakat dapat dihindari

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan meliputi kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan sebanyak 1 kali, dengan peserta 100 Orang. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama meliputi Kegiatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilaksanakan dengan beberapa kegiatan seperti Seminar



Pemahaman Kerukunan Umat Beragama sebanyak 2 kegiatan, Penyuluhan kepada TOGA, TOMAS Tingkat Kecamatan dilaksanakan 12 kali dan evaluasi berupa Rapat Koordinasi yang diwakili Dewan Penasehat dilaksanakan tiap bulan selama satu tahun atau sebanyak 12 kali serta rekomendasi pendirian Rumah Ibadat sebanyak 8 rekomendasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di sekitarnya.

Pada tahun 2009 sebanyak 9.38% permasalahan publik telah diselesaikan dengan melibatkan masyarakat, sementara targetnya sebesar 14.00%, maka capaiannya adalah 67%.

## **18. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN**

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian diimplementasikan melalui 7 (tujuh) program, yaitu Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kinerja Legislatif, Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas /Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur. Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja**

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari instansi



pemerintah kota serta mendorong terwujudnya praktik pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur.

Indikator ini menggambarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Surabaya terhadap aturan hukum dan disiplin dengan menggunakan indeks tahun 2005 sebagai indeks dasar.

Pada tahun 2009, pelanggaran hukum dan disiplin aparatur Pemerintah Kota Surabaya yang terjadi sebanyak 147 kasus. Bila dibandingkan dengan jumlah pelanggaran tahun 2005 sebanyak 440 kasus, maka indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur adalah sebesar 33.41%, sedangkan target indeks yang telah ditetapkan adalah 47%, maka capaian kerjanya mencapai 128.91%.

## **2. Program Peningkatan Kinerja Legislatif**

Program Peningkatan Kinerja Legislatif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja DPRD Kota Surabaya. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja legislatif.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 indikator yaitu:

### **a. Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum.**

Indikator tersebut menggambarkan tingkat produktivitas lembaga legislatif dan Pemerintah Kota dalam menghasilkan produk hukum berupa



Peraturan Daerah. Tahun 2009, lembaga legislatif dan Pemerintah Kota dapat menyelesaikan 14 buah raperda dari 19 raperda yang diproses atau terealisasi 73.68 %. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar 87.00%. Dengan demikian capaian indikator kinerjanya adalah 84.69%

**b. Jumlah Publik Hearing yang dilaksanakan.**

Publik hearing dilaksanakan untuk menilai apakah suara masyarakat telah cukup diakomodasi dalam membuat suatu produk hukum/pengambilan keputusan.

Dalam tahun 2009, ditargetkan melaksanakan 3 kali public hearing, dan pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun terealisasi 3 kali hearing/dialog yaitu dalam rangka Publik Hearing Pansus Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Publik Hearing terkait Raperda Perpustakaan, dan Publik Hearing Sistem Pendidikan Kota sehingga capaian indikator tersebut sebesar 100.00%.

**c. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti**

Indikator ini menggambarkan tingkat responsibilitas lembaga legislatif dalam menanggapi dan mengakomodasi keinginan/keluhan masyarakat.

Jumlah keluhan masyarakat yang diterima sebanyak 135 keluhan. Dari jumlah tersebut sebanyak 68 keluhan telah ditindaklanjuti atau 50.37 %. Dibandingkan target yang ditentukan sebesar 90.00 % maka capaian kinerjanya sebesar 55.97 %.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah**

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan daerah



lainnya, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

**a. Persentase Peningkatan PAD**

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2009 dengan target sebesar Rp.882,616,888,643,- terealisasi sebesar Rp.809,783,507,860,- atau mencapai 91,75%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 sebesar Rp. 729.213.319.344,-, persentase realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya mencapai 11,05%. Sehingga apabila dibandingkan dengan target sebesar 14,98% maka capaiannya adalah 73,77%.

**b. Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya**

Penerimaan daerah lainnya pada tahun 2009 tercapai 98,05% atau Rp.1.865.584.468.632,- dengan target Rp.1.902.667.778.672,-. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 sebesar Rp.1.589.549.450.265,-Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya mencapai 17,37%, sehingga apabila dibandingkan dengan target sebesar 18,99% maka capaiannya adalah 91,43%.

**4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan.**

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah meningkatnya pelayanan perijinan secara mudah, cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedurnya.

Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari dua indikator sebagai berikut :

**a. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian ijin**



Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi sampai sejauh mana kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan. Target yang ditetapkan atas indikator tersebut adalah kurang dari 7 hari. Berdasarkan data yang ada, rata-rata penyelesaian perijinan untuk beberapa jenis ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah < 7 hari Sehingga capaian kinerjanya adalah 100.00%.

**b. Jumlah Kecamatan yang menerapkan pelayanan perijinan**

Pelayanan IMB telah didesentralisasikan ke beberapa kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pelayanan akibat tidak terkonsentrasinya proses perijinan. Adapun perijinan yang diterapkan di Kecamatan adalah Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan atau IMB untuk bangunan tempat tinggal satu lantai dengan luas tanah  $\leq 200$  m<sup>2</sup>, mulai pemberkasan sampai dengan penerbitan IMB.

Kecamatan yang telah menerapkan pelayanan perijinan sebanyak 31 kecamatan yang berarti seluruh kecamatan di Surabaya telah menerapkan pelayanan perijinan. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 26 Kecamatan, maka capaian kinerjanya adalah 119.23%.

**5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

Program ini dimaksudkan untuk menata Satuan Kerja Perangkat Daerah serta menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dengan indikator persentase urusan yang dilaksanakan



Kecamatan.

Pada tahun 2009, sebanyak 100.00% urusan telah dilimpahkan ke Kecamatan. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90.90%, maka capaian kinerjanya adalah 110.01%.

## **6. Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas/Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi prasarana dan sarana gedung dan bangunan pemerintah, termasuk sekolah, puskesmas, kantor kelurahan, dan lain-lain melalui pemeliharaan dan pengadaan fasilitas dan gedung pemerintahan.

Adapun sasaran yang dicapai melalui program tersebut adalah meningkatnya ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan. Program ini terdiri dari 2 indikator yaitu :

### **a. Jumlah gedung pemerintah yang dibangun/diperbaiki.**

Jumlah gedung/sarana pemerintah yang selesai dibangun dan/diperbaiki selama tahun 2009 sebanyak 51 gedung Dengan demikian sampai dengan Tahun 2009 jumlah gedung yang diperbaiki/direhabilitasi adalah sebanyak 3,251 gedung. Sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 3,022 gedung, maka capaian indikator program tersebut adalah sebesar 107.58

### **b. Jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola**

Luas fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2009 adalah sebesar 429.40 Ha sedangkan target yang ditetapkan seluas 263.22 Ha, sehingga capaian kinerja





indikator program tersebut adalah 163.13%.

## **7. Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur**

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur. Capaian program diukur dengan Indikator prosentase pegawai yang melaksanakan tugas sesuai diklat yang diikuti. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur efektifitas upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan.

Pada tahun 2009, pegawai yang mengikuti Diklat sebanyak 1.443 pegawai yang terdiri dari Diklat teknis sebanyak 1.331 pegawai serta Diklat struktural sebanyak 112 pegawai. Sebanyak 1.106 peserta diklat telah melaksanakan tugas sesuai dengan diklat yang diikuti, atau sebanyak 76.65%, sedangkan target yang ditetapkan adalah 80.00% sehingga capaiannya 95.81%.

## **19. URUSAN WAJIB KEARSIPAN**

Urusan Wajib Kearsipan dilakukan melalui Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan sasaran meningkatnya tertib administrasi pemerintahan. Capaian sasaran program ini diukur melalui indikator Persentase SKPD/unit kerja yang melaksanakan tertib administrasi.

Target yang diharapkan pada tahun 2009 seluruh SKPD/unit kerja yang dibina (100%) telah melaksanakan tertib administrasi dalam hal ini menerapkan sistem kearsipan pola baru yaitu sebanyak 20 SKPD, ternyata realisasinya sebanyak 20 SKPD yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru tersebut. Maka capaian kinerjanya 100.00%.



## 20. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika tersebut dilaksanakan melalui 2 Program yaitu Program Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik. Kedua program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran program ini adalah tersedianya pusat data dan informasi dalam sistem jaringan berbasis TI yang terintegrasi. Pencapaian sasaran tersebut dinilai melalui dua indikator, yaitu :

#### 1. Persentase sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Indikator tersebut mengukur sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sampai dengan tahun 2009 ditetapkan target sebesar 81% atau setara dengan 25 sistem pelayanan yang terintegrasi. Pada tahun 2008 terdapat 25 sistem pelayanan yang terintegrasi dan dalam tahun 2009 terjadi penambahan/ pengintegrasian sebanyak 15 sistem. Dengan demikian total seluruhnya adalah 40 sistem pelayanan yang terintegrasi. Jumlah tersebut setara dengan 129.00%, maka capaian kinerjanya sebesar 159,26%.

#### 2. Persentase SKPD yang memiliki sistem database yang terintegrasi

Indikator ini ditujukan untuk mengukur integrasi sistem database antar SKPD yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan data. Sampai dengan tahun 2009 ditetapkan target sebesar 100% atau



setara dengan sistem database yang terintegrasi pada 37 SKPD. Pada tahun 2008 sistem database pada 25 SKPD telah terintegrasi dan dalam tahun 2009 terjadi penambahan/pengintegrasian pada 12 SKPD. Dengan demikian sistem data base pada 37 SKPD telah terintegrasi. Jumlah tersebut setara dengan 100.00% maka capaian kinerjanya adalah 100%.

#### **b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.**

Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakat mengakses dan mendapatkan informasi bagi kepentingan publik. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya sarana penyaluran informasi dan aspirasi publik, dengan indikator persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2009 terdapat 765 keluhan/aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota Surabaya. Dari 765 aspirasi tersebut, yang telah ditindaklanjuti adalah 765 keluhan atau 100.00%. Dibandingkan dengan target sebesar 98.00%, maka capaian kinerja indikator tersebut adalah 102.04%.

## **PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA KETAHANAN PANGAN**

Urusan Pilihan Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Ketahanan Pangan diimplementasikan melalui Program Pengembangan Kelautan, Perikanan dan Pertanian. Program Pengembangan Kelautan, Perikanan dan Pertanian



dimaksudkan untuk meningkatkan produksi hasil perikanan, kelautan, peternakan, dan produktivitas hasil pertanian serta ketersediaan pangan. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

**a. Jumlah produktivitas hasil perikanan budidaya udang**

Indikator jumlah produktivitas hasil perikanan budidaya udang diukur berdasarkan hasil panen udang (Kg) dibandingkan dengan luas lahan pertanian udang (Ha).

Pada tahun 2009, luas areal budidaya tambak di Kota Surabaya adalah 1.036,08 Ha dengan produksi 3.637,56 Kg sehingga produktivitas hasil perikanan budidaya udang adalah 877,75 Kg/Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 830 Kg/Ha, maka capaian kinerjanya 105,60 %.

**b. Jumlah produktivitas hasil pertanian (padi)**

Indikator jumlah produktivitas hasil pertanian (padi) diukur berdasarkan hasil panen padi (kwintal) dibandingkan dengan luas lahan pertanian padi (Ha).

Pada tahun 2009, luasan lahan pertanian padi di Kota Surabaya adalah 1.741 Ha, jumlah produksi padi adalah 14.855 kwintal, sehingga produktivitas hasil pertanian (padi) adalah 54,55 kwintal/Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 51,73 kwintal/Ha, maka capaian kinerjanya adalah 105,45 %.

**c. Jumlah hasil peternakan yang diawasi (daging sapi, kambing, domba, babi, dan ayam)**

Indikator ini dihitung dari jumlah hasil peternakan yang diawasi (daging sapi, kambing, domba, babi, dan ayam), dimaksudkan untuk



mengawasi keamanan pangan terutama ancaman peredaran penyakit pada hewan ternak.

Pada tahun 2009 hasil peternakan yang diawasi baik berupa daging sapi, kambing, domba, babi, dan unggas sebanyak 61.545,30 ton. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 59.446,04 ton, maka capaian kinerjanya mencapai 103,53 %.

**d. Persentase ketersediaan bahan pangan**

Indikator persentase ketersediaan bahan pangan diukur berdasarkan jumlah bahan pangan yang disediakan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan per-bahan pangan.

Pada tahun 2009, jumlah kebutuhan bahan pangan khususnya beras bagi masyarakat Kota Surabaya sebanyak 273.934,09 ton, sedangkan jumlah bahan pangan (khususnya beras) yang mampu disediakan sebanyak 366.620,97 ton, sehingga persentase ketersediaan pangan adalah 133,84%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni adanya kenaikan dalam ketersediaan bahan pangan sebesar 4% dari pencapaian tahun 2008 sebesar 127,69 %, maka capaian kinerjanya 153,75 %.

## **F. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Disamping penyelenggaraan urusan desentralisasi, Pemerintah Kota Surabaya juga menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.



Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Surabaya telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa departemen yang langsung ditujukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Tugas Pembantuan. Rincian Tugas Pembantuan yang diterima adalah sebagai berikut :

**a. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**

Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Pelaksana tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah RSUD Dr Soewandhie Surabaya. Nama kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan dengan bentuk kegiatan berupa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB.

**b. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA**

Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja,. Pelaksana tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Nama kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan bentuk kegiatan berupa Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan, Pengembangan Kelembagaan dan Pemetaan.

**c. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**

Untuk program ini Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan tugas pembantuan dari Departemen Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura



dan Direktorat Jenderal Peternakan. Instansi Pelaksana tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Pertanian Kota Surabaya.

**d. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN**

Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan. Pelaksana Tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Pertanian Kota Surabaya. Nama kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan bentuk kegiatan berupa operasional dan penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Kelurahan Tambak langon dan Kelurahan Greges.

**e. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN**

Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan. Pelaksana tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Pertanian Kota Surabaya. Nama kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir dengan bentuk kegiatan berupa operasional dan bantuan sosial bagi pelaku usaha di bidang perikanan yang meliputi nelayan, pengolah, pembudidaya, pengrajin dan pemasaran di Kelurahan Tambak langon dan Kelurahan Greges.

**f. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal



Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. Pelaksana tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya.

## **E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi: kerjasama antar daerah; kerjasama daerah dengan pihak ketiga; koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; pembinaan batas wilayah; pencegahan dan penanggulangan bencana; pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah

### **1. Kerjasama Antar Daerah**

Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerjasama antar daerah dengan beberapa kota di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri mitra kerjasama Kota Surabaya yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sampai dengan akhir tahun 2009 adalah Kabupaten Sidoarjo, Kota Yogyakarta, Kota Banjarmasin, Kota Batam, Bandung, Padang dan Kabupaten Gresik. Beberapa daerah lain yang masih dalam tahap peninjauan antara lain dengan daerah-daerah hinterland kota Surabaya yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan dengan mitra di luar negeri kerjasama yang telah ditandatangani naskah Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama *sister city* yaitu dengan Kota Seattle (Amerika Serikat), Kota Busan (Korea Selatan),





Kota Kochi (Jepang), Kota Guangzhou dan Kota Xiamen (China) serta kota Marseille (Perancis). Selain kerjasama tersebut kerjasama yang masih dalam bentuk naskah Letter of Intent (LoI) dan masih dalam tahap proses penandatanganan MoU antara lain Shah Alam (Malaysia) dan Varna (Bulgaria). Kota-kota di Luar Negeri yang masih dalam proses penjajakan antara lain dengan Dubai (Uni Emirates Arab) dan Johannesburg (Afrika Selatan).

## **2. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam kerangka kerjasama ini adalah kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM, dan perguruan tinggi swasta. Pada tahun 2007 Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya telah memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga, diuraikan sebagai berikut:

### **a. PT. HM Sampoerna Tbk**

Pada tanggal 04 Maret 2009, Pemerintah Kota Surabaya menandatangani perjanjian kerjasama terbuka dengan PT. HM Sampoerna, Tbk, berupa penyediaan ruang khusus merokok di Gedung Balai Kota Surabaya dan di Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Hal ini merupakan salah satu bentuk partisipasi PT. HM Sampoerna Tbk, sebagai salah satu penghasil rokok. pada perjanjian hibah ini PT. HM Sampoerna Tbk menghibahkan 4 (empat) buah ruangan khusus merokok beserta dengan kelengkapannya



**b. KONI Kota Surabaya**

Pemerintah Kota Surabaya melakukan Penandatanganan Kerjasama tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Atlet Kota Surabaya pada tanggal 26 Juni 2009. Perjanjian Kerjasama ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Surabaya kepada atlet Kota Surabaya yang berprestasi. Perjanjian Kerjasama ini menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan memberikan prioritas pada atlet Kota Surabaya yang berprestasi untuk diterima di SMP, SMA, dan SMK Negeri Kota Surabaya. Mekanismenya melalui pemberian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

**c. Direktorat Jenderal Pajak**

Pemerintah Kota Surabaya melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang *Pertukaran Data Secara Elektronik* dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 6 Nopember 2009.

**d. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur**

Dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi serta guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam *business process* di Kota Surabaya maka Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Penandatanganan Perjanjian



Kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2009. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kualitas pelayanan masyarakat dalam *business process* di Kota Surabaya khususnya pada prosedur pengadaan barang/jasa secara elektronik.

**e. PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB)**

Penandatanganan Perjanjian Hibah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2009 ini merupakan bentuk partisipasi PT. PJB selaku Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) yang bergerak dibidang energi listrik bagi PKL yang ada di Kota Surabaya. Wujud dari Perjanjian Hibah ini berupa pembangunan canopy di Foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya. Pembangunan canopy tersebut adalah bentuk kepedulian PT. PJB terhadap penataan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya khususnya di Foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya.

**f. PT. TELKOM Divre V Jatim**

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. TELKOM Divre V Jatim adalah mengenai Pengembangan Surabaya Multimedia City, ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2009. Tujuan dari Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan serta mampu menumbuhkembangkan Teknologi Informasi (TI) melalui pengembangan *Surabaya Multimedia City* (SMMC) khususnya layanan internet di segenap penjuru Kota Surabaya.

**g. PT. Carrefour Indonesia, PT. HM. Sampoerna, PT. Telkom Tbk.**



Kerjasama terhadap ketiga perusahaan di atas adalah mengenai sentra bisnis untuk meningkatkan kualitas produk olahan hasil kelautan dan perikanan kota Surabaya Naskah Kesepakatan Bersama ditandatangani tanggal 14 September 2009. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir Surabaya melalui Sentra Bisnis Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan kompetensi dari PT. Carrefour Indonesia, PT. HM. Sampoerna, dan PT. Telkom Tbk. Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan di pesisir Surabaya dengan semangat gotong royong yang berbasis komunitas / kelompok.

**h. Universitas Airlangga**

**Fasilitasi Kegiatan KKN**

Fasilitasi kegiatan KKN dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 14 Pebruari 2009. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan perguruan tinggi khususnya Universitas Airlangga Surabaya yang telah berlangsung selama hampir 5 (lima) tahun. Setelah selesai kegiatan KKN-BBM maka bagian kerjasama memfasilitasi untuk melaksanakan seminar hasil-hasil KKN tersebut. Seminar dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2009 di Ruang Sidang Kahuripan Gedung Perpustakaan lantai 3 Kampus C Universitas Airlangga



### 3. KOORDINASI DENGAN INVESTASI VERTIKAL

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka koordinasi dengan Instansi Vertikal ditekankan pada peningkatan koordinasi penyelenggaraan keagamaan, urusan politik luar negeri, urusan keamanan, urusan moneter dan fiskal, urusan yustisi serta dalam hal penyelenggaraan pelayanan umum.

Koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Selama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kota Surabaya selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal.

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan masing-masing Unit Satuan Kerja di Pemerintah Kota Surabaya, dilakukan dengan hampir semua instansi/departemen di pemerintah pusat terkait pelaksanaan tugasnya. Misalnya dengan Departemen Dalam Negeri Negeri, Departemen Luar



Negeri, Departemen Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, BPK, BPKP, dll. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan Pemerintah Kota Surabaya tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat.

#### **4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

Dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diturunkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 tentang daerah untuk pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang ada diwilayahnya, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan menetapkan kejelasan batas wilayah administrasi.

Pada tahun 2009 fokus pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan untuk itu adalah kegiatan Penataan Batas Wilayah Kota Surabaya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai batas wilayah kelurahan di kota Surabaya baik dilapangan maupun diatas peta, adapun tujuannya penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas kelurahan yang berbatasan di Kota Surabaya, sedangkan peta wilayah bertujuan sebagai sarana untuk mendeteksi secara dini dan sebagai acuan untuk memperoleh informasi serta meningkatkan pengawasan, monitoring serta koordinasi dan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah sengketa batas wilayah administrasi Kecamatan /



Kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2009 pemasangan pilar batas di 60 titik di 39 Kelurahan di 12 Kecamatan. Penyelenggaran pembinaan batas wilayah Kota Surabaya tahun 2009 di dukung oleh APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 pada kegiatan Penataan batas wilayah Kota Surabaya di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

## **5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Secara Geografis Kota Surabaya tidak termasuk daerah rawan bencana karena cukup jauh dari gunung berapi aktif dan tidak dialiri oleh sungai-sungai besar sehingga sampai saat ini relatif tidak pernah terjadi bencana di Kota Surabaya. Namun demikian dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di Kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiap siagaan komponen masyarakat dan Pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermanfaat kepada masyarakat. Selanjutnya memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di Daerah, maka pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana di Kota Surabaya telah dibentuk dengan Keputusan Walikota Surabaya, yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.451201436.1.212009 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya. Satlak PB yang diketuai oleh Walikota Surabaya, dengan Ketua Pelaksana Harian Wakil Walikota Surabaya mempunyai tugas untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat terhadap bencana sehingga korban dan



penderitanya dapat dibatasi dan diminimalkan. Salak PB Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan pengungsi di Surabaya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, yang merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak sebelum, pada saat kejadian dan setelah terjadinya bencana yang dimulai dengan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Meskipun Surabaya tidak termasuk daerah rawan bencana tetapi langkah antisipasi dan kesiapsiagaan aparat pemerintah dan masyarakat perlu disiagakan sesuai UU Penanggulangan Bencana, agar masalah kebencanaan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat juga harus selalu siap dalam menghadapi bencana sedangkan langkah-langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan koordinasi antar Satlak PB Kota Surabaya yang diketuai oleh Walikota Surabaya dengan Ketua Pelaksana Harian Wakil Walikota Surabaya, rapat koordinasi dilaksanakan per triwulan dan pada kondisi-kondisi yang mendesak dan dianggap perlu.
- b. Mengadakan kegiatan simulasi Penanggulangan Bencana di Halaman Taman Surya pada bulan Nopember 2009 dengan melibatkan seluruh anggota Saflak pB, Komponen Masyarakat dan pihak swasta (PKK, Tagana, SAR Sampoerna dan Avick Kobe Jepang).
- c. Mengintensifkan pemantauan wilayah dengan bantuan aparatur





kecamatan dan instansi terkait, terutama dalam hal-hal kebencanaan ataupun kejadian alam yang berpotensi mengganggu jalannya kehidupan masyarakat.

- d. Menyiapkan aparatur dan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pembekalan teknis penanggulangan bencana kepada Pelajar sebanyak 100 orang perwakilan siswa SMA/SMK se Surabaya terutama pada wilayah yang dianggap rawan bencana.
- e. Menyiapkan aparatur dan membekali 100 orang potensi masyarakat dikecamatan/kelurahan tentang pengetahuan dan ketrampilan penanggulangan bencana berupa Kursus Kader Pelaksana Linmas (SUSKALAK LINMAS) selama 10 hari di Pangkalan Udara Angkatan Laut (LANUDAL-JUANDA) dengan instruktur dari TNI AL Polisi, SAR, PMI, BMG dan Pemerintah Kota Surabaya
- f. Melaksanakan antisipasi dan evaluasi protap Penanggulangan Bencana dengan melibatkan potensi dan instansi anggota Satlak PB yang menangani penanggulangan Bencana di lingkungan perkotaan dengan kegiatan simulasi penanggulangan bencana perkotaan yang mungkin terjadi. Sampai dengan tahun 2009 Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan potensi masyarakat untuk peduli bencana melalui kegiatan Latihan Dasar dan Suskalak



## 6. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Pemerintah Kota Surabaya tidak mengelola kawasan khusus sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesuai penjelasan Pasal 9 Ayat (1) yaitu kawasan khusus adalah kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan pertahanan dan keamanan. Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi – fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri dan sebagainya.

## 7. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut, gangguan yang terjadi berupa SARA, Anarkisme, Sparatisme atau yang lainnya sepanjang tahun 2009 ada 4 kejadian yang sudah terselesaikan, salah satunya adalah masalah Masjid At-Taqwa.

Pengawasan Jam kegiatan Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum dilaksanakan oleh Bakesbangpol dan Linmas selaku Ketua Tim bersama dengan Satpol pp selaku Penegak Peraturan Daerah (PERDA), Bag. Hukum untuk Sosialisasi perda, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk pembayaran pajak, Dinas pariwisata untuk ijin RHU, Bagian Humas untuk mendokumentasi dan Polwiltabes untuk ijin keramaian. Pada tahun 2009 pelanggaran Rumah Hiburan Umum sebanyak 4



## F. PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Surabaya.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2009, merupakan kesinambungan dari penyelenggaraan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.



Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan/saran/pendapat/tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang, dapat menyampaikan melalui [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id) atau melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya Jl. Jimerto No. 25 - 27 Surabaya Telepon: 031- 5312144 psw. 601 Fax: 031 -5475920.

Surabaya,

**WALIKOTA SURABAYA**

**TTD**

**BAMBANG DWI HARTONO**